

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999, tata kelola keuangan pemerintahan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga perangkat UU ini menjadi dasar bagi Institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sendiri. Pelaksanaan otonomi ini sebagian besar didanai oleh pajak yang bersumber dari uang masyarakat yang disetorkan kepada negara. Sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas penggunaan dana tersebut, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna informasi keuangan daerah mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Mahmudi (2010) dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, suatu laporan keuangan harus memenuhi karakteristik yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Namun, terpenuhinya semua karakteristik tersebut tidak membuat semua pengguna dapat memahami laporan keuangan dengan baik. Bagi beberapa pengguna yang belum memahami dengan baik tentang informasi dari laporan keuangan tersebut, maka diperlukan adanya analisis laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu pengguna untuk memahami dan menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut, serta mengevaluasi laporan keuangan (Mahmudi, 2010). Untuk menganalisis laporan keuangan tersebut, penulis menggunakan analisis aset dan analisis rasio keuangan yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan selama tiga periode. Dalam hal ini, dapat diketahui adanya kenaikan atau penurunan yang terjadi dari periode sebelumnya dengan membandingkan tiga periode laporan keuangan tersebut. Hasil dari melakukan analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu organisasi sektor publik selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia (RI) yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai peran penting dalam proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), penatausahaan penerimaan negara dan pertanggungjawaban pelaksana anggaran. Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam rangka menuju tata laksana kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), KPPN sebagai salah satu aparatur negara telah melakukan perubahan paradigma layanan dengan cara memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat, tanpa biaya serta proses pekerjaan yang transparan (Dirjen Perbendaharaan, 2009).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-18/PB/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Padang ditetapkan sebagai KPPN Percontohan sejak tanggal 1 Februari 2008. KPPN Percontohan ini dibentuk sebagai wujud peningkatan pelayanan ke stakeholders yang mengedepankan prinsip pelayanan satu tempat (*one stop service*), penerapan basis sederhana, pemanfaatan IT, penerapan sistem pengendalian internal, penerapan pengelolaan kinerja, serta penerapan layanan yang transparan dan akuntabilitas. Dengan demikian KPPN Padang selayaknya bisa menjadi contoh bagi Instansi lainnya dalam menciptakan layanan yang transparan dan akuntabilitas melalui kinerja laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam tugas akhir ini dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANG BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013-2015”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2013-2015 dengan menggunakan analisis aset?
2. Bagaimana kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2013-2015 dengan menggunakan analisis rasio keuangan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Tujuan Umum
 - a. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
 - b. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
 - c. Untuk mengaplikasikan serta membandingkan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi dengan keadaan sesungguhnya di lingkungan kerja.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk menganalisis kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2013-2015 menggunakan analisis aset.

- b. Untuk menganalisis kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2013-2015 menggunakan analisis rasio keuangan.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini antara lain:

1. Bagi Penulis

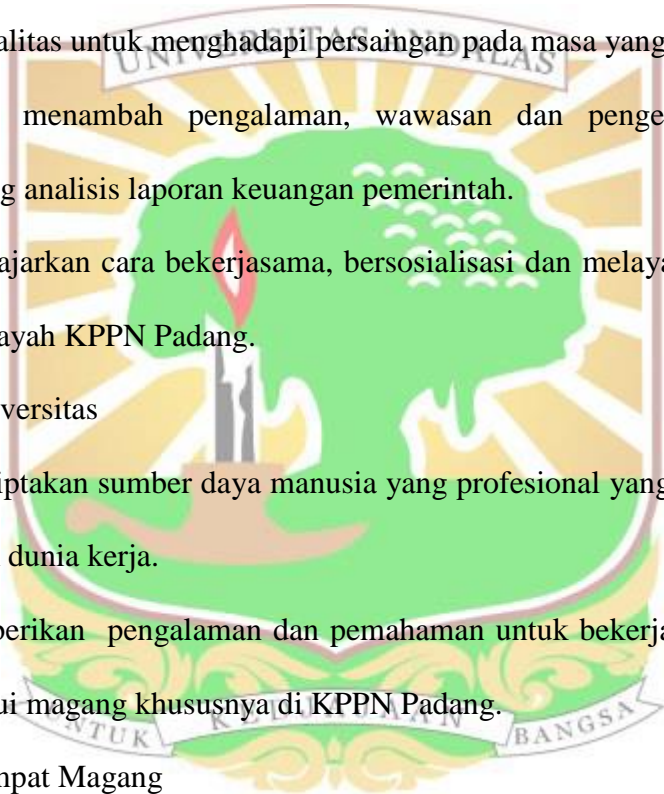
- a. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
- b. Dapat menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan penulis tentang analisis laporan keuangan pemerintah.
- c. Mengajarkan cara bekerjasama, bersosialisasi dan melayani satuan kerja di wilayah KPPN Padang.

2. Bagi Universitas

- a. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
- b. Memberikan pengalaman dan pemahaman untuk bekerja di dunia kerja melalui magang khususnya di KPPN Padang.

3. Bagi Tempat Magang

- a. Dapat memperoleh manfaat dan saran mengenai analisis kinerja keuangan kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Padang berdasarkan laporan keuangan tahun 2013-2015.
- b. Dapat membantu instansi pemerintah khususnya di KPPN Padang dalam menyelesaikan tugasnya.



4. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam melakukan analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik.

1.5. Tempat, Waktu, dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2016 sampai tanggal 26 Februari 2016 pada jam layanan KPPN Padang. Magang dilakukan 5 hari dalam seminggu, yaitu Senin-Jum'at. Jadwal magang disesuaikan dengan jadwal jam kerja KPPN Padang, magang dimulai pukul 07.30 sampai 17.00. Setiap sekali 2 (dua) minggu pada hari jumat pagi semua pegawai termasuk mahasiswa magang mengikuti kegiatan olahraga (senam pagi) yang dimulai pukul 07.00-08.00.

Pada saat kegiatan magang, penulis ditempatkan pada seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERA). Adapun kegiatan magang yang penulis lakukan pada selama magang sebagai berikut (kertas kerja harian terlampir, lampiran 1):

1. Pengesahan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta pengesahan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi).
2. Pengeinputan Karwas (Kartu Pengawasan) UP (Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan).
3. Pengeinputan Rekapitulasi Hasil Telaah LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga) satuan kerja KPPN.
4. Mendistribusikan surat ke satuan kerja.

5. Mengisi kertas kerja telaah laporan keuangan tahunan tingkat satuan kerja (Non BLU/Non Badan Layanan Umum).
6. Penginputan data laporan keuangan satuan kerja ke Microsoft Exel dan penginputan rincian transaksi yang di proses saat *open period*.
7. Pengumpulan data setoran (Surat Setoran Bukan Pajak/SSBP dan Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) satuan kerja dalam rangka nihil UP/TUP.
8. Menatausahakan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan).
9. Pengisian masukan/tanggapan atas penerapan SOP (*Standar Operating Procedure*) pada KPPN Padang.

1.6. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengadakan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan laporan-laporan serta sumber informasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas yang ditemukan pada saat studi lapangan (*field research*).

1.6.2. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan penulis adalah :

1. Analisa Kualitatif/Deskriptif

Berupa pandangan, tinjauan, paparan dari penulis berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh serta membandingkannya dengan materi yang diterima penulis di bangku perkuliahan.

2. Analisa Kuantitatif

Analisa ini adalah analisa dengan menggunakan angka-angka sebagai hasil perhitungan data-data berupa tabel dan rumus-rumus untuk menguji kebenaran hipotesa.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat, waktu, dan kegiatan magang, metode pengumpulan data dan analisa data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Menjelaskan tentang laporan keuangan, laporan keuangan organisasi sektor publik, kinerja keuangan dan analisis laporan keuangan.

BAB III : Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang

Memberikan gambaran tentang instansi yang terkait mulai dari sejarah berdirinya, letak geografis, visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta janji dan motto layanan, struktur organisasi, tugas dan uraian pekerjaan masing-masing seksi, mitra kerja, komposisi pegawai, dan sumber daya manusia.

BAB IV : Pembahasan

Memberikan penjelasan tentang kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2013-2015 dengan menggunakan analisis aset, kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2013-2015 dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

BAB V : Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

